



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANURA KELANA IRIANO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 643366

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.800.000.000

1. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HADIAH Rp. 118.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 558.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 217.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 367.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
8. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 65.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 963.335.264 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 2.828.835.264 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.828.835.264 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.